

Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal

Yuliana Eka Purwati¹, Amrie Firmansyah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
yuliana.127239102@stu.untar.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Mei 2024

Disetujui : 14 Juni 2024

Dipublikasikan : 12 Oktober 2024

ABSTRACT

Capital expenditures are budget expenditures for acquiring fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period. This study examines the influence of regional independence, PAD effectiveness, and regional dependence on capital expenditure, with financial reports' quality as a moderating variable. The study uses 15 financial statements of district/city governments in Lampung Province from 2013 to 2022. The sample used in this research was 148 observation data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis for panel data. This study indicates that regional independence and PAD effectiveness do not affect capital expenditure. Regional dependence positively affects capital expenditure. The quality of financial reports can moderate the influence of regional dependence on capital expenditure. This study has practical contributions that can be used by the Ministry of Home Affairs and Regional Government to improve policies in allocating capital expenditure budgets in the regions.

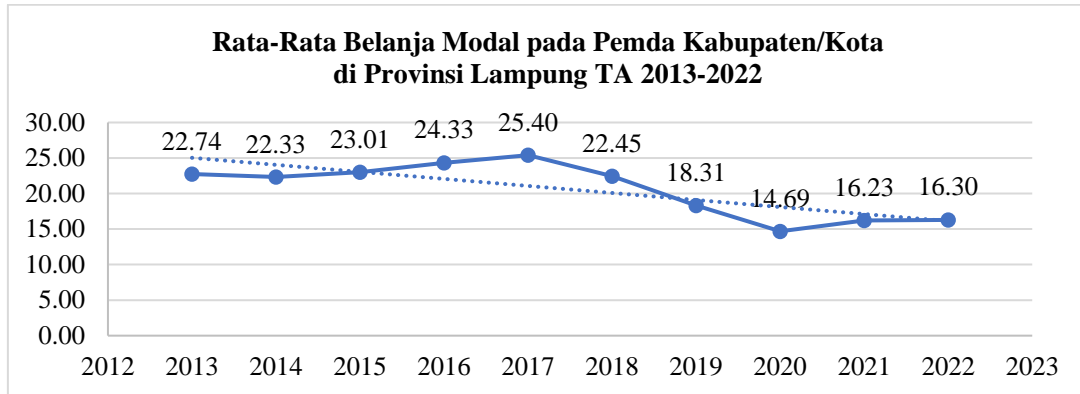
Keywords: *Capital expenditure; Regional independence; PAD effectiveness; Regional dependence; Financial reporting quality*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fajriati dkk., 2022). Otonomi daerah memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah (Pemda), potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (UU Nomor 23, 2014). Pemerintah pusat bertanggung jawab atas urusan agama, pertahanan dan keamanan nasional, sistem peradilan, kebijakan fiskal dan moneter, urusan luar negeri dan fungsi khusus lainnya seperti perencanaan ekonomi makro dan standar nasional (Akita dkk., 2021). Selain itu, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah Pemda mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kartikasari & Rohman, 2019). Bentuk pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan fasilitas layanan publik seperti penyediaan jalan yang memadai sebagai penunjang perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran pada sektor kesehatan dan pendidikan akan mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi (Paudel, 2023).

Penyediaan jalan yang memadai serta sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan diselenggarakan oleh Pemda menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran belanja modal. Suandani (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kondisi anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 10 (sepuluh) tahun terakhir (2013-2022) menunjukkan kecenderungan fluktuatif.

Persentase lebih dari 50% menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan infrastruktur (LKPD Provinsi Lampung, 2023). Rata-rata anggaran belanja modal pada Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 10 (sepuluh) tahun terakhir (2013-2022) memiliki persentase kurang dari 50% dari total belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum memprioritaskan belanja modal. Rata-rata persentase belanja modal disajikan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Persentase Belanja Modal TA 2013-2022

Sumber: LHP BPK Tahun 2014-2023, diolah

Akibat dari rendahnya persentase belanja modal di atas diantaranya terlihat pada kondisi jalan kabupaten/kota dengan predikat baik sebesar 27,45%. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi jalan kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan predikat baik sebesar 39,39% (Open Data PUPR, 2023). Dalam bidang kesehatan, perbandingan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung per 100.000 penduduk pada periode 10 tahun terakhir (2013-2022) sebesar 4 (3,46 s.d. 3,67). Angka tersebut belum memenuhi standar yaitu 5 puskesmas per 100.000 penduduk atau 1:20.000 penduduk (Reihana, 2023). Dalam bidang pendidikan, persentase ruang kelas dengan kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas pada sekolah dasar negeri di Provinsi Lampung sebesar 38,28%. Persentase tersebut masih di bawah rata-rata persentase dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 42,26% (Suharti, 2023). Persentase ruang kelas dengan kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas pada sekolah menengah pertama negeri di Provinsi Lampung sebesar 50,22%. Persentase tersebut masih di bawah rata-rata persentase dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 53,00% (Suharti, 2023).

Kondisi anggaran belanja modal dengan kecenderungan fluktuatif dan persentase belanja modal yang kurang dari 50% di atas membuat pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran belanja modal menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya telah menguji analisis keuangan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal diantaranya dilakukan dengan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Arif & Arza, 2018; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Novita & Nurhasanah, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022; Fajriati dkk., 2022), efisiensi keuangan daerah (Arif & Arza, 2020; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022; Fajriati dkk., 2022), kemandirian daerah (Arif & Arza, 2018; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Samudra & Handayani, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022), derajat desentralisasi fiskal (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Novita & Nurhasanah, 2020; Samudra & Handayani, 2020; Wibisono dkk., 2021), derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020), ketergantungan daerah (Purnamawati, 2019; Nurhasanah dkk., 2023; Novita & Nurhasanah, 2020; Khafif & Romandhon, 2022), tingkat pembiayaan SiLPA (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020), jumlah penduduk (Samudra & Handayani, 2020), keserasian belanja daerah (Arif & Arza, 2018), pertumbuhan ekonomi (Samudra & Handayani, 2020), dan pertumbuhan PAD (Andani, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan data sekunder dalam satu atau lebih Pemda diantaranya pada Provinsi Sumatera Barat, Bali, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta dengan periode bervariasi 5, 6, dan 10 tahun mulai dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2020.

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah, efektifitas PAD, dan

ketergantungan daerah terhadap belanja modal. Kemandirian daerah yang tinggi mengindikasikan kinerja keuangan yang baik dari suatu pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan mandiri atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menunjukkan kemandirian pemerintah daerah (Arif & Arza, 2018). Kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dan jumlah total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Indiyanti & Rahyuda (2018), Purnamawati (2019), Samudra & Handayani (2020), Wibisono dkk. (2021), dan Darmastuti dkk. (2022) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kemandirian daerah maka pengalokasian anggaran belanja modal juga semakin tinggi. Sementara itu penelitian Arif & Arza (2018), Kartikasari & Rohman (2019), dan Andani (2022) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Adanya ketidakseragaman pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal menjadi menarik untuk dilakukan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD agar mencapai target digambarkan melalui efektivitas PAD. Pencapaian PAD yang lebih besar dari targetnya, seharusnya dapat meningkatkan pengalokasian pada belanja modal (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Kinerja yang baik dari suatu pemerintah daerah diantaranya dinilai dari semakin tingginya efektivitas PAD (Halim, 2019). Purnamawati (2019) menyimpulkan bahwa semakin tinggi efektivitas PAD maka anggaran belanja modal akan semakin tinggi. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif & Arza (2018), Indiyanti & Rahyuda (2018), Andriyani (2020), Wibisono dkk. (2021), Andani (2022), Darmastuti dkk. (2022), dan Fajriati (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Adanya ketidakseragaman pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal menjadi menarik untuk dilakukan.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dana perimbangan dan jumlah realisasi pendapatan daerah. Semakin rendah ketergantungan daerah yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan Pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Ketergantungan daerah di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi (LKPD Provinsi Lampung, 2023). Nurhasanah dkk. (2023) menyatakan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Novita & Nurhasanah (2020) dan Khafif & Romandhon (2022) menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat maka semakin tinggi pengalokasian anggaran belanja modal. Sementara itu Purnamawati (2019) menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah tidak berpengaruh langsung terhadap belanja modal. Dengan adanya perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal menjadi perlu untuk dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel pemoderasi yaitu kualitas laporan keuangan yang diproses dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK setiap tahunnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah selaku agent kepada rakyat selaku principal atas pengelolaan sumber daya ekonomi suatu daerah (Rangkuti, 2022). Dalam laporan keuangan, informasi yang berpengaruh kepada rakyat sebagai principal dalam proses pengambilan keputusan harus disajikan secara sepenuhnya (*full disclosure*) oleh pemerintah daerah sebagai agent (Zulkarnain & Andriansyah, 2018). Selain itu, penelitian ini menggunakan tingkat pembiayaan SiLPA dan ukuran Pemda sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan agar fokus penelitian tentang pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan ketergantungan daerah terhadap belanja modal menjadi tepat serta model regresi yang diperoleh untuk memprediksi variabel dependen menjadi lebih baik.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik serta melengkapi literatur terkait dengan pengalokasian belanja modal pada penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi praktis yang dapat digunakan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran belanja modal di daerah.

STUDI LITERATUR

Teori keagenan didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai hubungan antara *agent* (manajemen perusahaan) dan *principal* (pemilik perusahaan). Dalam struktur di pemerintahan daerah, rakyat sebagai pihak yang mendelegasikan kewenangan (*principal*) kepada Kepala Daerah (*agent*, disebut pula sebagai eksekutif) dengan konsekuensi diusulkan diberhentikan (melalui legislatif) apabila Kepala Daerah dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan seperti yang diinginkan (Zulkarnain, 2020).

Rakyat sebagai *principal* memiliki hak untuk mendapatkan performa (kinerja) yang maksimal dari pemerintah daerah sebagai *agent* (Zulkarnain, 2020). Hasil kinerja pemerintah daerah yang nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat diantaranya berupa penyediaan jalan yang memadai serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan yang dilaksanakan menggunakan anggaran belanja modal.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah salah satunya dapat dinilai berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu determinan yang dapat digunakan sebagai proxy untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah opini auditor independen yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Jati, 2019). Menurut Arens dkk. (2012), laporan auditor independen dapat digunakan sebagai indikator keandalan laporan keuangan karena diasumsikan laporan keuangan yang telah diaudit menyajikan informasi lebih lengkap, akurat, dan tidak bias.

Kemandirian daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerah termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor (Nurliza, 2020). Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat mengalami peningkatan sehingga pengalokasian terhadap belanja modal juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) menunjukkan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Demikian juga penelitian Purnamawati (2019), Samudra & Handayani (2020), Wibisono dkk. (2021), dan Darmastuti dkk. (2022) menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018). Kemandirian daerah yang semakin tinggi berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat mengalami peningkatan sehingga pengalokasian terhadap belanja modal juga mengalami peningkatan.

H₁: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Efektivitas PAD merupakan salah satu analisis keuangan yang menekankan pada kapabilitas Pemda untuk dapat mewujudkan PAD yang berkaitan dengan target yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan. Dengan tercapainya target penerimaan PAD, Pemda memiliki wewenang yang lebih besar untuk membiayai kegiatan atau program Pemda dalam rangka melaksanakan pembangunan melalui peningkatan anggaran belanja modal (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Dalam usulan anggaran pendapatan, terdapat kecenderungan eksekutif mengusulkan target lebih rendah (asas minimal), supaya pada saat realisasi, target tersebut mudah dicapai. Kondisi dalam usulan anggaran seperti ini memberikan gambaran terdapat asimetri informasi di antara Pemda sebagai eksekutif (*agent*) dan rakyat yang diwakili legislatif (*principal*) (Zulkarnain, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2019) menunjukkan bahwa analisis keuangan daerah yang diprosikan dengan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pencapaian target PAD sejalan dengan peningkatan belanja modal yang selanjutnya digunakan untuk pelayanan publik seperti penyediaan jalan serta sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan.

H₂: Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Ketergantungan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Khafif & Romandhon, 2022). Nurhasanah dkk. (2023) menyatakan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kenaikan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat atau provinsi akan meningkatkan belanja modal. Ketergantungan daerah yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini

dapat menyebabkan pemerintah daerah sebagai agen menjadi kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai *principal*. Oleh karena itu, ketergantungan yang tinggi akan menyebabkan pemerintah daerah berpotensi menggunakan *self interest* untuk memprioritaskan proyek yang diminta oleh pemerintah pusat dibandingkan proyek yang diminta oleh masyarakat (Prayuda & Arifin, 2024).

H₃: Ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai *principal* untuk mengelola keuangan dan melakukan pertanggungjawaban dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar konflik keagenan dapat diminimalisir dan/atau dihilangkan (Chintya & Maria, 2023). Opini WTP yang diperoleh Pemda menunjukkan bahwa Pemda telah berhasil mempertanggungjawabkan kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki (Rangkuti, 2022). Keberhasilan tersebut diantaranya dalam bentuk kemandirian daerah dimana sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari PAD. Tingginya kemandirian daerah berarti kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan juga meningkat termasuk kegiatan yang dibiayai melalui belanja modal. Kemandirian daerah juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan/investasi melalui belanja modal (Darmastuti dkk., 2022).

H₄: Kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif kemandirian daerah terhadap belanja modal.

Menurut Arens dkk. (2012), laporan auditor independen dapat digunakan sebagai indikator keandalan laporan keuangan karena diasumsikan laporan keuangan yang telah diaudit menyajikan informasi lebih lengkap, akurat, dan tidak bias. Ketika suatu Pemda memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan merupakan informasi yang lengkap, akurat, dan tidak bias. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diantaranya yaitu realisasi penerimaan dan target PAD selama satu tahun. Penerimaan PAD yang telah mencapai target yang ditetapkan menunjukkan efektivitas PAD yang dikelola oleh Pemda. Realisasi PAD yang dijalankan oleh pemerintah daerah lebih tinggi, dapat digunakan untuk belanja modal (Darmastuti dkk., 2022).

H₅: Kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif efektivitas PAD terhadap belanja modal.

Pemda yang memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa Pemda telah berpedoman pada SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan serta membuat kepercayaan masyarakat meningkat dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk diantaranya pengelolaan pendapatan daerah. Tingginya persentase pendapatan transfer atas total pendapatan daerah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah sebagian besar didanai dari pendapatan transfer, sehingga dalam penentuan belanja modal harus mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Andriyani dkk., 2020). Belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial (Afnisah, 2020).

H₆: Kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif ketergantungan daerah terhadap belanja modal.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah (Rangkuti, 2022). Belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial (Afnisah, 2020).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung

yang berjumlah sebanyak 15 Pemda. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling* jenuh, dimana semua populasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam penelitian ini dijadikan sampel (Sugiyono, 2019). Data sampel yang digunakan adalah informasi anggaran dan realisasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Audited* dan LHP BPK atas LKPD pada 15 Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir atau mulai dari TA 2013 s.d. 2022. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 148 data observasi.

Variabel terikat (*dependent variable*) yang merupakan perhatian utama dalam penelitian ini adalah anggaran belanja modal. Variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan ketergantungan daerah. Sedangkan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah kualitas keuangan daerah, serta variabel kontrol yaitu jumlah SiLPA dan ukuran Pemda.

Belanja modal diukur dengan perbandingan antara anggaran belanja modal dan total anggaran belanja daerah pada TA berkenaan (Arif & Arza, 2018), dengan formulasi sebagai berikut.

$$BM = \frac{\text{Anggaran Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}}$$

Kemandirian daerah dalam penelitian ini diukur melalui perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi pendapatan transfer pada tahun sebelumnya (Andani, 2022), dengan formulasi sebagai berikut.

$$KKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}}$$

Dalam penelitian ini, efektivitas PAD diukur dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran atau target PAD pada tahun sebelumnya (Fajriati dkk., 2022), dengan formulasi sebagai berikut.

$$EPAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Selanjutnya ketergantungan daerah diukur dengan membandingkan jumlah realisasi pendapatan transfer dengan jumlah realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya (Zulkarnain, 2020), dengan formulasi sebagai berikut.

$$KTD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Kualitas laporan keuangan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini diukur melalui opini BPK atas LKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya (Firmansyah dkk., 2022) yaitu dengan nilai 1 untuk LKPD dengan opini WTP dan nilai 0 untuk LKPD dengan opini selain WTP. Selain itu terdapat dua variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat pembiayaan SiLPA dan ukuran pemerintah daerah. Tingkat pembiayaan SiLPA diukur dengan membandingkan jumlah SiLPA dua tahun sebelumnya dengan realisasi belanja daerah pada tahun sebelumnya (Marlianita & Saleh, 2020), dengan formulasi sebagai berikut.

$$SiLPA = \frac{\text{Jumlah SiLPA}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$$

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ukuran Pemda diukur dengan \ln total aset yang dimiliki Pemda pada tahun sebelumnya (Firmansyah dkk., 2022) sebagai berikut.

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk data panel. Pengujian variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan model persamaan sebagai berikut:

$$BM_{it} = a + b_1KKD_{it} + b_2EPAD_{it} + b_3KTD_{it} + b_4KLK_{it} + b_5(KKD_{it} \times KLK_{it}) + b_6(EPAD_{it} \times KLK_{it}) + b_7(KTD_{it} \times KLK_{it}) + b_8SiLPA_{it} + b_9SIZE_{it} + e_{it}$$

dimana:

BM sebagai anggaran Belanja Modal; α sebagai konstanta; $b_1 - b_9$ sebagai koefisien regresi; KKD sebagai Kemandirian Daerah; EPAD sebagai Efektivitas PAD; KTD sebagai Ketergantungan Daerah; KLK sebagai variabel pemoderasi Kualitas Laporan Keuangan; SiLPA sebagai Tingkat Pembiayaan SiLPA; SIZE sebagai Ukuran Pemda; dan e sebagai nilai *error*.

HASIL

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKD	148	0,012	0,425	0,088	0,087
EPAD	148	0,359	1,949	0,926	0,241
KTD	148	0,669	0,970	0,875	0,078
KLK	148	0	1	0,601	0,491
SILPA	148	-0,005	0,213	0,059	0,043
SIZE	148	26,915	29,354	28,362	0,410
BM	148	0,069	0,595	0,217	0,078

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Untuk menentukan model estimasi yang terbaik dalam penelitian ini maka dilakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) untuk *Cross-section F* yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Hasil dari Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) untuk *Cross-section Random* yaitu $0,046 < 0,05$ sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan karena model terpilih berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman adalah *Fixed Effect Model*.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang kuat/semipurna antara variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan *Correlation Matrix*. Berdasarkan hasil *Correlation Matrix* diketahui bahwa tidak terdapat nilai variabel independen yang lebih dari 0,80 sehingga disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yang meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil uji Glejser diketahui bahwa nilai probabilitas dari KKD, EPAD, KTD, SILPA, dan UK lebih besar dari 0,10, sehingga disimpulkan bahwa model penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Ringkasan hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1,8882	0,7147	2,6417	0,0047
KKD	-0,2041	0,1800	-1,1342	0,1294
EPAD	0,0048	0,0277	0,1728	0,4316
KTD	0,2197	0,1160	1,8934	0,0303
KLK	-0,1761	0,1609	-1,0947	0,1379
KKDXKLK	-0,0002	0,1642	-0,0011	0,4996
EPADXKLK	-0,0499	0,0499	-0,9998	0,1597
KTDXKLK	0,2431	0,1805	1,3470	0,0902
SILPA	0,2669	0,1674	1,5943	0,0567
SIZE	-0,0586	0,0231	-2,5388	0,0062
<i>R-squared</i>	0,5553			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,4728			

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>F-statistic</i>	6,7316			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,0000			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

PEMBAHASAN

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga dengan hasil tersebut maka H_1 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kartika & Rohman (2019), Arif & Arza (2018), dan Andani (2022) yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai rata-rata kemandirian daerah Pemda di Provinsi Lampung pada TA 2013 s.d. 2022 sebesar 0,0883 (8,83%) menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat atau belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial karena peran pemerintah pusat lebih dominan. Kemandirian daerah sangat bergantung pada nilai PAD yang dapat direalisasikan oleh Pemda selaku pemungut PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan. Dalam teori keagenan dinyatakan diantaranya bahwa agen cenderung mengusulkan target lebih rendah (asas minimal), supaya pada saat realisasi, target tersebut mudah dicapai. Dengan kemandirian daerah yang masih sangat rendah menunjukkan bahwa peran Pemda belum maksimal dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah misalnya melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (Agustina, 2021).

Jumlah PAD yang rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menyebabkan Pemda tidak leluasa dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatannya untuk belanja daerah termasuk belanja modal. Sebagai contoh nilai kemandirian daerah Lampung Tengah pada 2017 sebesar 0,0647 (6,47%) dengan alokasi belanja modal sebesar 0,1929 (19,29%). Kemandirian daerah pada 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,0709 (7,09%) sedangkan alokasi belanja modal mengalami penurunan menjadi sebesar 0,1596 (15,96%), serta pada 2019 kemandirian daerah mengalami kenaikan menjadi 0,0759 (7,59%) namun alokasi belanja modal mengalami penurunan menjadi sebesar 0,1428 (14,28%).

Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga dengan hasil tersebut maka H_2 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018), Arif & Arza (2018), Andriyani dkk. (2020), Wibisono dkk. (2021), Andani (2022), Darmastuti dkk. (2022), dan Fajriati dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara rata-rata Pemda di Provinsi Lampung pada periode 2013 s.d. 2022 dapat merealisasikan PAD sebesar 0,9258 (92,58%) dari target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam teori keagenan yaitu Pemda selaku eksekutif (agen) cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar target tersebut mudah dicapai. Realisasi PAD sebesar 92,58% termasuk dalam klasifikasi Cukup Efektif meskipun belum mencapai target 100%. Capaian tersebut merupakan gambaran kemampuan dan keberhasilan Pemda dalam memungut pajak dengan beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya adanya faktor egosektoral, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan wajib pajak, pesatnya perkembangan teknologi, dan situasi keamanan serta keadaan *force majeure* (Erawati dkk., 2019).

Dengan rata-rata nilai Efektivitas PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2013 s.d. 2022 sebesar 92,58%, alokasi belanja modal pada periode yang sama rata-rata sebesar 0,2166 (21,66%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum maksimal mengalokasikan pendapatan untuk belanja modal publik, sebaliknya lebih banyak digunakan untuk belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja rutin lainnya.

Pengaruh Ketergantungan Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, sehingga dengan hasil tersebut maka H_3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhasanah dkk. (2023) yang menyatakan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian Novita & Nurhasanah (2020) dan Khafif & Romandhon (2022) juga menyatakan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap belanja modal namun dengan arah hubungan negatif yang berarti bahwa semakin rendah ketergantungan daerah, maka Pemda dikatakan semakin mandiri sehingga dapat mengalokasikan belanja modal yang besar. Ketergantungan daerah berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai ketergantungan daerah pada Pemda di Provinsi Lampung pada 2013 s.d. 2022 secara rata-rata sebesar 0,8752 (87,52%) yang berarti bahwa sebagian besar pendapatan Pemda masih bergantung dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pendapatan transfer tersebut kemudian digunakan untuk pengalokasian anggaran belanja modal yang bertujuan diantaranya untuk meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan dasar di daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar yang diselenggarakan oleh Pemda.

Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungan Antara Kemandirian Daerah dan Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat memperkuat pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal. Dengan hasil tersebut maka H_4 ditolak. Dalam teori keagenan, Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan *principal* terhadap kinerja agen. Oleh karena itu, Pemda akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja selama ini baik dan memberikan laporan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Siregar, 2019). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan totalitas dari bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Rangkuti, 2022). Opini WTP yang diperoleh Pemda menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemda telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian, perolehan opini laporan keuangan Pemda tidak mempengaruhi kemandirian daerah serta pengalokasian anggaran belanja modal. Kemandirian daerah merupakan kemampuan suatu daerah menggali potensi pendapatan asli daerahnya dan memaksimalkan potensi pemungutan pajak serta retribusi. Sumber keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dapat memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat digunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui belanja modal tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat yang terkadang dengan programnya dirasa kurang tepat bagi beberapa daerah (Lukitawati & Pringgabayu, 2020).

Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungan Antara Efektivitas PAD dan Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat memperkuat pengaruh positif Efektivitas PAD terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan hasil tersebut maka H_5 ditolak. Pemda selaku agen dan pihak eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik (Siregar, 2019). Salah satu determinan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah opini auditor independen yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Jati, 2019). Ketika suatu Pemda memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan merupakan informasi yang lengkap, akurat, dan tidak bias. Namun demikian berdasarkan hasil pengujian, diperoleh atau tidaknya opini WTP oleh Pemda, tidak mempengaruhi Efektivitas PAD serta pengalokasian belanja modal. Efektivitas PAD diantaranya dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta kebijakan-kebijakan pemungutan pajak (Tulandi dkk, 2020).

Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungan Antara Ketergantungan Daerah dan Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif ketergantungan daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan hasil tersebut maka H_6 diterima. Nilai informasi laporan keuangan publik yang baik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Pemda yang memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa Pemda telah berpedoman pada SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan serta membuat kepercayaan masyarakat meningkat dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk diantaranya pengelolaan pendapatan daerah untuk belanja modal. Tingginya pendapatan transfer dibandingkan dengan total pendapatan daerah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah didanai sebagian besar dari pendapatan transfer, sehingga dalam penentuan belanja modal harus mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada pemilihan data sampel yang digunakan hanya berdasarkan data yang tersedia dalam LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2022), sehingga hasil pengujian ini tidak menggeneralisir hasil untuk data dalam LKPD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel independen efisiensi keuangan daerah yang memungkinkan dapat berpengaruh terhadap belanja modal serta penelitian dengan menggunakan data sampel kabupaten/kota di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran belanja modal di daerah sehingga belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kemandirian daerah dan Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga tinggi rendahnya kemandirian daerah dan Efektivitas PAD tidak dapat digunakan sebagai indikator besar kecilnya belanja modal yang dialokasikan oleh Pemda. Ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal yang menunjukkan bahwa kenaikan ketergantungan daerah sejalan dengan peningkatan belanja modal yang dialokasikan oleh Pemda. Kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif ketergantungan daerah terhadap belanja modal yang dialokasikan oleh Pemda. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal yang menunjukkan kenaikan pembiayaan SiLPA akan meningkatkan belanja modal. Sementara itu ukuran Pemda berpengaruh negatif terhadap belanja modal yang berarti bahwa peningkatan ukuran Pemda menyebabkan penurunan belanja modal. Kualitas laporan keuangan tidak dapat memperkuat pengaruh positif kemandirian daerah daerah dan efektivitas PAD, namun dapat memperkuat pengaruh positif ketergantungan daerah terhadap belanja modal.

REFERENSI

- Afnisah, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.

- Agustina, S. (2021). *Tingkat kemandirian pemerintah kota Bandar Lampung tertinggi se-Lampung*. <https://lampost.co/opini/tingkat-kemandirian-pemerintah-kota-bandar-lampung-tertinggi-se-lampung/>
- Akita, T, Riadi, M. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues?. *Regional Science Policy and Practice*, 13(6), 1842-1866.
- Andani, M. F. (2022). Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(2), 111-125.
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & Diah PA, E. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132-144.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, & Mark, S. Beasley. (2012). *Auditing and Assurance Services- An Integrated Approach Fifteenth Edition*. Pearson Education Inc.
- Arif, M. dan Arza, F. I. (2018). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 21-36.
- Chintya, K. D., & Maria, E. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 586-601. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7274>.
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1-13.
- Erawati, I., Yuniarta, G. A., dan Yasa, I. N. P. (2019). Analisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganessa*, 10(3), 356-367.
- Fajriati, C. E., Engkus, & Anwar, H. S. (2022). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020. *Jurnal Moderat*, 8(3), 436-451.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4 (2).
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Yuniar, M. R.. (2022). Local Governments Financial Reporting in Papua and West Papua: Do Local Government Characteristics Matter?. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14 (2), 139-147.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Indiyanti, N. M. D. & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(9), 4713-4746.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 21(1). 1-14.
- Jensen, M., C., & W. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305-360.
- Kartikasari, M. A. & Rohman, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1-14.
- Khafif, A., & Romandhon. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(2), 38-46.
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T.J.W. (2019). Capital expenditure of local government. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1-13
- Lukitawati, L. J. & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing*, 1(2), 1-11.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.

- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25-35. <https://doi.org/10.35313/iarj.v1i1.2357>.
- Novita, I & Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat periode tahun anggaran 2012-2017). *Jurnal Buana Ilmu*, 4(2), 64-77.
- Nurhasanah, N. N., Oktarida, A., & Arifin, K. Z. (2023). Pengaruh ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan silpa terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 229-239.
- Paudel, R. C. (2023). Capital expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for Nepal. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2191449>.
- Prayuda, Y. M & Arifin, J. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6, 77-87.
- Purnamawati, A. (2019). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. *Tesis*. Universitas Lampung.
- Rangkuti, A. Z. (2022). Analisis determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Samudra, G. & Handayani, N. (2020). Pengaruh kemandirian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-20.
- Siregar, A. S. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suandani, K. P., & Astawa, I G. P. B.. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(3), 728-739.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. CV Alfabeta.
- Tulandi, V. M., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Analisis efektivitas pajak parkir dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 8(4), 381-388.
- Wibisono, N., Indartini, M., & Rahayu, E. E.(2021). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota se-Bakorwil Madiun. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 83-88.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1),2620-8490.